

BI Harus Terbuka Soal Data Ekonomi

Senin , 26 Maret 2018 | 19:10

http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/526/bi_harus_terbuka_soal_data_ekonomi



Sumber Foto tribunnews.com

Rizal Ramli

POPULER

Indeks Saham Ditutup Turun TipisJelang Rehat Siang IHS6 Turun 31 PoinProbosutedjo Meninggal DuniaUber dan Grab "Merger"Presiden Tinjau Proyek Padat Karya di Kalsel

JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, Deputy Gubernur dan Gubernur baru Bank Indonesia harus berani berterus terang dalam menjelaskan data ekonomi Indonesia serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan bagi pemerintah.

"Misalnya, soal pelemahan rupiah, jujur saja bukan hanya karena tekanan eksternal, tapi ada juga faktor domestik yang membuat rupiah melemah," kata Rizal yang juga Mantan Menteri Keuangan dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut Rizal, melemahnya nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga Maret 2018 bukan hanya disebabkan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dan rencana ekspansi fiskal Presiden Donald Trump, seperti yang kerap disebutkan BI sebagai penyebab utama depresiasi rupiah.

Namun, melemahnya rupiah karena juga kondisi ekonomi domestik seperti masih banyaknya aliran modal jangka pendek di pasar keuangan, dan juga neraca transaksi berjalan yang terus menyisakan lubang defisit."Gubernur BI yang sekarang tidak pernah

menyebutkan komponen domestiknya yang membuat rupiah melemah. Padahal ekonomi kita masih sangat rentan," ujarnya.

"Selalu disebutkan alasannya, negara negara lain juga mata uang melemah, dikomparasikan, padahal ada pekerjaan rumah di kondisi domestik yang bisa menjadi catatan BI," katanya seperti dilansir *antaranews.com*.

Untuk perbaikan kebijakan di pasar keuangan, kata Rizal, Gubernur baru BI harus mampu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan agar mampu mengurangi dana asing di pasar keuangan (*hot money*) dan menggantikannya dengan dana asing berjangka panjang.

Selain itu, Pimpinan Bank Sentral juga harus mampu mendorong pemerintah atau kementerian di sektor rill agar mampu memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan, melalui kebijakan di sektor perdagangan.